

# ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DALAM PENERAPAN *e-GOVERNMENT*

**Dionisia Mariani Randang, William Djani, Laurensius Say Rani**  
Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Nusa Cendana-Kupang  
Email : dinarandang@rocketmail.com

## ABSTRAK

Electronic Government adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Atas tuntutan perubahan paradigma pelayanan publik ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai mulai menerapkan e-Government dalam memberikan pelayanan publik guna memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Penerapan e-government, kendala-kendala dalam pelaksanaannya dan bagaimana Proyeksi penerapan e-government di Kabupaten Manggarai ke depannya. Penelitian ini menggunakan Teori Darcy dalam Indrajit (2002) tentang indikator penerapan e-government khususnya e-planning dan e-budgeting, yaitu: Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency/Visibility, Budgets, dan Technology. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan paradigma post positivisme. Lokasi Penelitian di Kabupaten Manggarai, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta menggunakan analisis SWOT. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Rendahnya tingkat kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penerapan e-government, dengan temuan dalam rise yaitu: Belum terbentuknya kerangka hukum yang mengatur penerapan e-government di Kabupaten Manggarai, Rendahnya komitmen Pemerintah dalam penerapan e-government, Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi, dan komunikasi di Kabupaten Manggarai, Belum memadainya SDM, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung penerapan e-government, dan anggaran untuk e-government yang masih minim. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan e-government dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penyediaan sumber daya yang mendukung dalam penerapan e-government agar terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, dan tranparan.

**Kata kunci : Analisis Kesiapan, e-government, e-planning, e-budgeting**

## PENDAHULUAN

Aneka tuntutan, perkembangan dan perubahan paradigma pemerintah mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mulai menerapkan *E-government* dalam memberikan pelayanan publik guna memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien. Karena itu Pemerintah Kabupaten Manggarai memutuskan untuk bekerjasama dengan Kabupaten Batang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang sudah terlebih dahulu menerapkan *E-Government*, ditandai dengan Penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding atau MoU*) oleh Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, SH.MH dan Bupati Batang, H. Wihaji, S.Ag, M.Pd yang berlangsung di kantor Bupati Batang pada tanggal 12 Oktober 2017(sumber: [www.manggaraikab.go.id](http://www.manggaraikab.go.id)).

Munculnya reformasi *e-government* ini dilatarbelakangi oleh perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD Kabupaten Manggarai yang tidak transparan dan efektif.

Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD di Kabupaten Manggarai perlu dibenahi dilihat dari kewajaran laporan yang selalu mendapat predikat WDP dan banyaknya jumlah temuan-temuan yang tidak ditindaklanjuti. Sehingga berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai 2015, 2016, dan 2017 tentunya menjadi hal yang menguatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu menerapkan *e-government* khususnya *e-planning* dan *e-budgeting*.

Penerapan *e-government* di Kabupaten Manggarai memerlukan berbagai persiapan, dan dalam penelitian ini akan digunakan 7 elemen penerapan *e-government* menurut Darcy (dalam Indrajit, 2002) yang sudah mencakup segala aspek dalam kesiapan penerapan *e-government* di Kabupaten Manggarai, yaitu ;

1. *Political environment*, adalah keadaan atau suasana politik di mana program *e-government* tersebut diterapkan.
2. *Leadership*, adalah unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan kenyataan dalam penerapan *e-government*.
3. *Planning*, adalah gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif *e-government* diproyeksikan.
4. *Stakeholders*, adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung terhadap penyelenggaraan program *e-government* terkait.
5. *Transparency/Visibility*, adalah harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder.
6. *Budgets*, adalah Kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek *e-Government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek.
7. *Technology*, adalah Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan di dalam *e-Government* sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang paling canggih.

Dari uraian di atas, peneliti ingin menganalisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penerapan *e-government* serta kendala-kendala apa yang dihadapi. sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan program *e-government* ini. Analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi analisis kesiapan Kabupaten Manggarai dalam penerapan *E-Government* yaitu *e-planning* dan *e-budgeting*. Dari aktivitas analisis ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana kesiapan Kabupaten Manggarai dalam penerapan *e-government*.

## Landasan Teori

### *Electronic Government (e-government)*

#### 1) Definisi E-Government

Menurut Indrajit (2004), apabila di lihat dari sejarahnya, konsep e-government berkembang karena adanya tiga pemicu utama, yaitu:

1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *Civil Society*, *Good Corporate Governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.
2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya.
4. Kedekatan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Inisiasi pemerintah elektronik e-Government pun kemudian terus dikembangkan untuk menjawab tuntutan tersebut.

*e-Government* merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis. Melalui pengembangan *e-Government*, pemerintah mengharapkan dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *e-Government* dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya *e-Government* dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Ada beragam definisi mengenai *e-Government*, tergantung kepada sudut pandang mana pihak yang mendefinisikan serta tingkatan perkembangan yang ada.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 *Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*, yang dimaksud *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *Good Governance*.

Penelitian ini akan menggunakan 7 (tujuh) elemen sukses yang harus dimiliki dalam mengembangkan konsep-konsep digital pada sektor publik melalui penerapan *e-Government* menurut (Darcy dalam Indrajit, 2002). Pendapat dari Darcy ini digunakan dalam penelitian karena peneliti merasa bahwa 7 (tujuh) elemen penerapan *e-Government* menurut Darcy ini sudah mencakup segala aspek yang diperlukan dalam penerapan *e-Government*. Darcy menjabarkannya sebagai berikut:

### 1. *Political Environment*

Elemen pertama dan paling krusial dalam penerapan *e-Government* adalah *Political Environment*. *Political Environment* adalah keadaan atau suasana politik di mana program *e-Government* tersebut diterapkan. Ada dua tipe proyek sehubungan dengan hal ini. Pertama adalah *Top Down Project*, di mana eksistensi sebuah proyek ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif sebagai otoritas tertinggi pemerintah didukung oleh kalangan legislatif sebagai pemberi mandat. Sementara itu proyek kedua adalah *Bottom-Up Project* yang didasarkan pada inisiatif dari para birokrat yang berada di salah satu lembaga pemerintah atau departemen. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang diharapkan dalam efektivitas penerapan *e-Government* adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep-konsep *e-Government* secara serius dan mendukung inisiatif yang berhubungan dengan *e-Government*.

### 2. *Leadership*

Elemen kedua ini berhubungan dengan unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan kenyataan dalam penerapan *e-Government*. Untuk mencapai efektivitas, setidaknya ada tiga hal minimum yang dibutuhkan pemerintah, yaitu:

- a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan demi tercapainya efektivitas *e-Government*.

### 3. *Planning*

Planning atau perencanaan adalah sebuah proses. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahap inilah gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif *e-Government* diproyeksikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah perencanaan yang baik akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan sebuah program, dalam hal ini yang ingin dicapai adalah efektivitas penerapan *e-Government*.

### 4. *Stakeholders*

Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung terhadap penyelenggaraan program *e-Government* terkait. Pihak-pihak yang dianggap sebagai stakeholder utama dalam proyek *e-Government* adalah pemerintah, Sektor swasta, dan masyarakat yang bersama-sama dalam usaha penerapan *e-Government*.

### 5. *Transparency/Visibility*

Transparansi sebuah proyek *e-Government* sangat erat kaitannya dengan keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh *stakeholder*. Dimungkinkannya pihak-pihak yang berkepentingan mengakses data dan informasi terkait dengan proyek yang sedang berlangsung secara tidak langsung merupakan sarana pemasaran (*marketing*) yang cukup efektif, karena di sana terlihat keseriusan pemerintah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya melalui penerapan beragam proyek *e-Government*.

### 6. *Budgets*

Kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek *e-Government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek.

Besarnya anggaran yang disediakan pemerintah sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait.

### 7. *Technology*

Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan di dalam *e-Government* sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang paling canggih. Pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah proyek *e-Government* sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. Maksudnya, semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan, yang cenderung akan meningkatkan probabilitas tercapainya efektivitas suatu program.

## *e-Planning dan e-Budgeting*

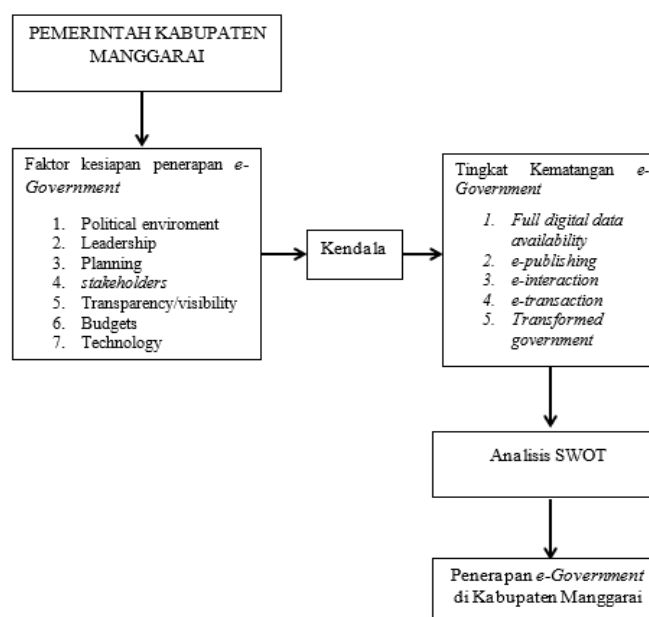
### 1. *E-Planning*

Aplikasi *e-Planning* atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi. *e-Planning* menjadi alat bantu Bappeda dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. *e-Planning* bertujuan mewujudkan *Good Governance*, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

### 2. *e-Budgeting*

*e-Budgeting* adalah alat bantu proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta menjaga pengendalian dan konsistensi perencanaan dan penganggaran.

## Kerangka Berpikir



Sumber : Indrajit (2002) dan Misuraca (2007), (diolah Penulis, 2018)



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Di sini peneliti bermaksud akan menggambarkan tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penerapan *e-Government*. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Manggarai. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (2007, h.289) yang mengemukakan bahwa ada tiga kelompok analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penerapan e-government di Kabupaten Manggarai

Pertama, *Political Environment*. Dukungan politik merupakan penentu utama dan cukup kuat untuk adopsi *e-Government*. Dengan merujuk pada kondisi tersebut, regulasi yang dibuat khusus untuk mengimplementasikan *e-Government* di kabupaten Manggarai memang belum ada, baik berupa Peraturan Daerah ataupun Perbup, yang menjadi acuan hukum untuk penerapan *e-Government* di Kabupaten Manggarai hanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 dan arahan dari Pemendagri No. 86 Tahun 2017. Peraturan daerah ini tentunya sangat penting demi memperkuat legalitas dari penerapan *e-Government* tersebut yang memiliki rujukan pedoman dan konsep yang jelas tentang arah kebijakan dalam implementasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Kondisi semacam ini tentunya membutuhkan dukungan politik dari semua pihak khususnya DPRD Kabupaten Manggarai sebagai mitra Pemerintah untuk bersama-sama membuat regulasi sehingga arah dan tujuan dalam penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai akan jelas, tegas dan terarah.

Kedua, *Leadership*. Tanda-tanda adanya kesiapan biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau *leader* dari pemerintahan yang memperlihatkan *political will* untuk mempromosikan pengimplementasian *e-Government*. Pemimpin ini tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus pula menjadi motivator ulung di dalam fase implementasi (Indrajit, 2005). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah mempunyai komitmen untuk menerapkan e-government dengan melakukan berbagai persiapan untuk menerapkannya. Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batang yang telah lebih dulu menerapkan *e-Government* dengan tujuan pendalaman program e-government dan mengadopsi sistem *e-Government* dengan sumber daya manusia yang ada. Namun Visi misi Pemerintah Kabupaten Manggarai belum mendukung penerapan *e-Government*, dimanavisimisi Kabupaten Manggarai masih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu ketersediaan SDM dan Ketersediaan fasilitas penunjang seperti ketersediaan komputer dan koneksi internet juga belum memadai. Kendala dalam implementasi e-Government salah satunya dikarenakan oleh faktor kepemimpinan. Lemahnya sumber daya manusia juga menjadi faktor yang penghambat sebagai akibat dari banyaknya aparatur pemerintah yang awam terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan dasar yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan *e-government*.

Ketiga, *Planning*. Belum ada model perencanaan secara keseluruhan untuk pengembangan *e-Government*,

Pemerintah Kabupaten Manggarai masih bergantung dengan rencana dan kerjasama dengan Kabupaten Batang. Hasil Evaluasi SPBE tahun 2018 menunjukkan bahwa untuk pembuatan Kebijakan rencana induk SPBE (indikator 3) di Kabupaten Manggarai masih berada pada tingkat 1, dimana tingkat 1 ini berarti belum tersedianya rencana induk Penerapan *e-Government* di Kabupaten Manggarai yang tentunya dapat menyebabkan kurang terarahnya penerapan *e-Government* di Kabupaten Manggarai. Dibuktikan dengan hasil keseluruhan dari Evaluasi mandiri ini yang hanya mencapai indeks 2,12 dari 7 Aspek yang dinilai, dimana indeks 2,12 ini masuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Manggarai harus menyiapkan rencana induk penerapan *e-Government* ini agar lebih terarah.

Keempat, *Stakeholders*, adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung terhadap penyelenggaraan program *e-Government* terkait. Mengutip pendapat Rasyid, et. al. (2002:292), bahwa dalam implementasi terjadi interaksi yang melibatkan berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat yang dikenal dengan nama stakeholder's. Selanjutnya Keberadaan kelompok kepentingan ini menurut Sunggono (1994:140) bahwa kelompok-kelompok ini sering memainkan peranan yang sangat penting bukan saja pada waktu implementasinya. Keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi yang menyebabkan belum optimalnya fungsi *e-Government* sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat Kabupaten Manggarai. Pandangan-pandangan mereka terhadap suatu kebijakan publik yang akan diimplementasikan atau komunikasi mereka dengan masa pendukungnya tentang suatu kebijakan publik, mempunyai arti penting sebagai cara partisipasi para pelaksana dan obyek kebijakan (warga masyarakat) di dalam implementasi kebijakan. Siap tidaknya suatu Daerah untuk mulai menerapkan konsep *e-Government* sangat bergantung pada dua hal utama, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada jenis atau model *e-Government* yang akan diterapkan, yaitu : Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di Negara atau Daerah terkait; dan ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintahan tersebut. Dengan kata lain, problem kesiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip *e-government* bukanlah merupakan masalah pemerintah saja, tetapi adalah masalah bersama seluruh komunitas didalam domain pemerintahan yang dimaksud, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya (Indrajit,2005).

Kelima, *Transparency/Visibility*, adalah harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder. Terwujudnya transparansi pelayanan, hal ini terlihat dengan kehadiran *website* Kabupaten Manggarai telah menjadi media informasi yang efektif untuk menyebarluaskan informasi-informasi berkaitan dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai wujud transparansi pelayanan walaupun sebatas informasi.

Keenam, *Budgets*. Memang ketersediaan sumber daya yang cukup terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial merupakan salah satu hal terpenting untuk menunjang pelaksanaan berbagai inisiatif *e-Government* di suatu daerah. Sumber daya finansial harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin karena tanpa adanya anggaran yang cukup maka implementasi *e-Government* di suatu daerah menjadi mustahil untuk direalisasikan. Terlebih untuk menerapkan *e-Government* sendiri dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Anggaran penerapan *e-Government* di Kabupaten Manggarai masih sangat minim sehingga untuk penyediaan teknologi guna menunjang penerapan *e-Government* belum dapat terwujud

Ketujuh, *Technology*. Hal tersebut menjadi penting dan sejalan dengan pernyataan Kumorotomo (2010), "...bahwa kecenderungan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi, sejak awal harus disadari bahwa aplikasi *e-Government* mesti dipersiapkan dengan matang supaya tidak terjadi kegagalan dan penurunan kinerja pelayanan" (sumber: <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/>)

, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018). Keterbatasan anggaran menyebabkan teknologi untuk penerapan *e-Government* tidak dapat terlaksana. Teknologi seperti *fiber optic* belum bisa terwujud karena faktor lokasi kantor-kantor perangkat daerah yang tidak terpusat yang dapat menghabiskan biaya yang sangat besar. Selain itu jaringan internet di Kabupaten Manggarai belum menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah dan masih dalam proses peningkatan.

### **Proyeksi Penerapan e-government di Kabupaten Manggarai**

Tingkat Kematangan penerapan *e-Government* di kabupaten Manggarai sudah sampai pada level *e-Interaction* karena *Website* Pemerintah Kabupaten Manggarai sudah mempunyai menu/akses untuk terjadinya interaksi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat melalui menu Kontak pada *website* yang didalamnya tertera alamat e-mail dan nomor telepon. Berdasarkan hasil analisis SWOT, ditemukan 4 (empat) strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengembangkan *e-Government*, yaitu;

1. Memperkuat kebijakan pembangunan *e-Government* melalui pembuatan payung hukum yang mengatur tentang pelaksanaan *e-Government* di Pemerintahan Kabupaten Manggarai.
2. Memanfaatkan Teknologi informasi secara optimal untuk layanan *e-Government* Pemerintahan maupun publik
3. Mengembangkan kapasitas SDM
4. Melakukan koordinasi penganggaran untuk pengembangan *e-Government* secara keseluruhan di Pemerintahan Kabupaten Manggarai.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwasannya memang penerapan *e-Government* di Kabupaten Manggarai telah membuka pintu masuknya teknologi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Manggarai masih belum optimal. Di lihat dari Elemen Sukses menurut Darcy telah dianalisis berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dan ditemukan berapa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Penerapan *e-Government*, yaitu

- a. Belum terbentuknya kerangka hukum yang mengatur penerapan *e-Government* di Kabupaten Manggarai.
- b. Rendahnya komitmen Pemerintah dalam penerapan *e-Government*.
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi, dan komunikasi di Kabupaten Manggarai.
- d. Belum memadainya SDM.
- e. Anggaran untuk *e-Government* yang masih minim.

### **SARAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sehubungan dengan analisis kesiapan Kabupaten Manggarai dalam penerapan e-government sebaiknya perlu dioptimalkan lagi persiapannya di beberapa aspek yang belum atau yang masih kurang optimal seperti:

1. Perlu dibuat payung hukum yang jelas yang mengatur tentang e-government khususnya e-planning dan *e-Budgeting*.
2. Perlunya pengalokasian anggaran khusus untuk menunjang penerapan *e-Government*.
3. Perlunya pelatihan SDM.



## REFERENSI

- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt. 2003. "The New Public Service: An Approach to Reform". International Review of Public Administration.
- Djumadal, J. Surat. 2005. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB. Bandung.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. dkk. 2005. E-Government in Action. ANDI. Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. dkk. 2005. E-Government in Action. ANDI. Yogyakarta.
- Kharel, Purusottam, et. al. 2012. "e-Government Implementation in Nepal : A Challenges". International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering Volume 2, Issue 1, January 2012. ISSN: 2277 128X. www.ijarcsse.com
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Yogyakarta dan E-procurement di Pemkot Surabaya. Makalah KAN Juni 2008 UGM. Jogjakarta. Diakses dari <http://kumoro.staff.ugm.ac.id>. Diakses: 20/8/2018).
- Misuraca, G. 2007. "e-Governance in Africa : From Theory to Action : A Handbook ICTs for Local Governance (Ottawa IDRC, 2007)
- Moon, M.J. 2003. "Can IT Help Government to Restore Public Trust?: Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector". Paper presented at the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'03, Hawaii, 6–9 January)
- Rasyid, M. Ryas. 1998. Makna Pemerintahan. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Welch, E. and W. Wong. 2005. "Global Information Technology Pressure and Government Accountability: The Mediating Effect of the Domestic Context on Website Openness". Journal of Public Administration Research and Theory
- <http://kupang.tribunnews.com/2018/03/29/>), diakses tanggal 10 Agustus 2018
- [www.manggaraikab.co.id](http://www.manggaraikab.co.id)